

RENJA PERUBAHAN
DPMPTSP
KABUPATEN BANGKA BARAT



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PENYUSUNAN	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
2.1 HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	8
3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	8
BAB V PENUTUP	9

DAFTAR LAMPIRAN

TABEL 2.1	FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA TW I
TABEL 3.1	DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor: 000.7/2/BAPPERIDA/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk segera menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

Sebagai dokumen perencanaan OPD Tahun 2024 mempunyai juga kedudukan yang strategis untuk menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS) sehingga akhirnya ditetapkan menjadi APBD Tahun 2024. Demikian halnya dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan PPAS APBD untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

Perubahan RKPD disusun apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMTSP berdasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 56 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 desember 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 seri A);
25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 Desember 2023 (berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 seri A).

26. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ 1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2024 adalah sebagai upaya sinergitas terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 dan ada pertimbangan perlunya perubahan yang dilihat dari hasil evaluasi kebutuhan DPMPTSP untuk peningkatan kualitas publik.

➤ 1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2024 ditujukan untuk memberikan usulan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD yang menjelaskan pengertian ringkas dokumen Perubahan Renja OPD dan proses penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD, dasar penyusunan yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 triwulan I Tahun 2024.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di tambah serta yang diprioritaskan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

B A B II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penilaian sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Memperhatikan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2024 telah selesai pada Triwulan I, pada tabel. 2.1 (daftar terlampir).

2.1. Hasil Evaluasi Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil Renja pada Triwulan I tahun 2024 berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Sebesar **Rp. 5.775.846.266,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 165.869.000,-** atau **2,87 %**, yang terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sedangkan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dengan Target **Rp. 186.734.152** dengan realisasi **Rp. 0,-** atau **0 %**, yang terdiri dari Rertribusi Persetujuan Bangunan Gedung, retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Pada Triwulan I DPMNAKERTRANS dipisah menjadi DPMPTSP sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat.

BAB III**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan. Oleh karena itu perubahan rencana program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP meliputi:

1. Usulan kegiatan baru/alternatif diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik oleh OPD serta kegiatan mendesak dan penting untuk dilaksanakan di tahun 2024 maupun kegiatan yang merupakan arahan dari kementerian untuk dilaksanakan di daerah namun belum dianggarkan di APBD Tahun 2024 serta kegiatan untuk mengungkit pencapaian indikator pembangunan daerah tahun 2024.
2. Usulan penghapusan kegiatan diarahkan kepada kegiatan yang dianggap kurang mendukung dalam pencapaian indikator pembangunan tahun 2024 ,terkait kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, serta yang sampai dengan saat ini belum memiliki syarat pendukung pelaksanaan kegiatan.

3.1. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas DPMPTSP dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 secara lebih jelas dan terinci dapat dilihat pada tabel 3.1 (daftar terlampir).

BAB IV**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Dokumen ini juga mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Oleh karena itu diharapkan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Stakeholder terkait dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat.

Mentok, Juli 2024
Kepala



Yuwanda Eka Putra, SKM., M.Si
NIP. 197707101996031001

BUKTI SERAH TERIMA

SK PBG

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : _____
Nomor Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama Lengkap : _____
Jabatan : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMILIK PBG** yang selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** telah menyerahkan SK PBG dengan Nomor Registrasi: SLF-190506-02032024-01 dan Nomor SK PBG: SK-PBG-190506-29042025-001 atas nama Pemilik CV. LEONA ENERGY kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kedua** telah menerima SK PBG dengan Nomor Registrasi : SLF-190506-02032024-01 dan Nomor SK PBG: SK-PBG-190506-29042025-001 atas nama Pemilik CV. LEONA ENERGY dari **Pihak Pertama**.

Demikian Berita Serah Terima SK PBG ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENERIMA

BUKTI SERAH TERIMA
SK PBG

Pada hari ini **Rabu** tanggal 30 bulan **April** tahun 2025 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **Antoni**
Nomor Telepon : **08117171790**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama Lengkap : **Intan Rizky Ravanella**
Jabatan : **Pemilik Bangunan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMILIK PBG** yang selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** telah menyerahkan SK PBG dengan Nomor Registrasi: PBG-190503-15102024-01 dan Nomor SK PBG: SK-PBG-190503-30042025-002 atas nama Pemilik Intan Rizky Ravanella kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kedua** telah menerima SK PBG dengan Nomor Registrasi : PBG-190503-15102024-01 dan Nomor SK PBG: SK-PBG-190503-30042025-002 atas nama Pemilik Intan Rizky Ravanella dari **Pihak Pertama**.

Demikian Berita Serah Terima SK PBG ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

PIHAK KEDUA



PENERIMA

L A M P I R A N

Tabel.3.1.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
											Program/Kegiatan/Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional	
											Tolok Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Sebelum perubahan	Tolok Ukur setelah perubahan	Target Setelah perubahan					
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6.602.783.966,00	6.722.783.966,00	6.467.750.000,00			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6.602.783.966,00	6.722.783.966,00	6.467.750.000,00			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA PENANAMAN MODAL										6.602.783.966,00	6.722.783.966,00	6.467.750.000,00			
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola 100 Persen	Nilai SAKIP	70,00	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah										
				100 Persen pemerintahan yang profesional dan akuntabel			opini BPK	WTP												
							Maturitas SPIP	Berkembang												
							Indeks SPBE	Baik												
							Indeks Profesionalitas ASN	65,07								5.320.244.966,00	5.440.244.966,00		5.467.750.000,00	
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.500.000,00	1.500.000,00	25.000.000,00			
2	18	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300.000,00	300.000,00	6.000.000,00	APBD	

Kode	Usan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Kinerja						
							Tolak Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tolak Ukur setelah perubahan	Program/Kegiatan/Subkegiatan					
2 18 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD				Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RMA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen RMA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RMA- SKPD	1 dokumen	300.000.00	300.000.00	5.000.000.00		APBD	
2 18 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-SKPD				Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RMA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RMA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RMA- SKPD	1 dokumen	300.000.00	300.000.00	2.000.000.00		APBD	
2 18 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300.000.00	300.000.00	6.000.000.00		APBD	
2 18 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300.000.00	300.000.00	6.000.000.00		APBD	
2 18 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.378.514.223.00	3.376.514.223.00	4.813.000.000.00			
2 18 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.375.614.223.00	3.375.614.223.00	4.000.000.000.00		APBD	

Kode		Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (dari Program/ Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sastraan Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Pembelian Mula (Rp.)	Keterangan		Sumber Anggaran
								Program/Kegiatan/Sub-kegiatan		Target Setelah Perubahan	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan		Target Setelah Perubahan				Prioritas Pembangunan Nasional		
								Tidak Ulu sebelum perubahan	Target Uraian		Tidak Ulu setelah perubahan	Target Setelah Perubahan							
2	18	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD	Kab. Banggai Barat, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD	1 laporan	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD	1 laporan	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00			APSD	
2	18	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alur Tahap SKPD	Kab. Banggai Barat, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	2 laporan	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	2 laporan	300.000,00	300.000,00	4.000.000,00			APSD	
2	18	01	2	02	0008	Penyusunan Pedoman dan Analisis Program, Rencana Anggaran	Kab. Banggai Barat, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Jumlah Dokumen Pedoman dan Analisis Program, Rencana Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pedoman dan Analisis Program, Rencana Anggaran	2 dokumen	300.000,00	300.000,00	4.000.000,00			APSD	
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terdapatnya pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Terdapatnya pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300.000,00	300.000,00	8.500.000,00				
2	18	01	2	03	0006	Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banggai Barat, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Jumlah Laporan Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	Jumlah Laporan Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300.000,00	300.000,00	8.500.000,00			APSD	
2	18	01	2	04		Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terdapatnya pelaksanaan Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Terdapatnya pelaksanaan Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00				

Kode	Ususi/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolak Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tolak Ukur setelah perubahan	Target Setelah perubahan	Target Setelah perubahan					
2 18 01 2 04 0004	Pendidikan dan Pondidikan Ojek Rahibus Daerah					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Ojek, Subjek dan Wajo Rahibus Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dola Ojek, Subjek dan Wajo Rahibus Daerah	12 Dokumen	300 000 00	300 000 00	2 500 000 00		APBD	
2 18 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	900 000 00	900 000 00	18 500 000 00			
2 07 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Akibat Kelangkaan	25 paket	25 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Akibat Kelangkaan	25 paket			12 500 000 00			
2 07 01 2 05 05	Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengkaderan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300 000 00	300 000 00	2 000 000 00		APBD	
2 07 01 2 05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	60 orang	60 orang	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialiasi Peraturan Perundang Undangan	15 orang	300 000 00	300 000 00	2 000 000 00		APBD	
2 07 01 2 05 0011	Benangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikut Benangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	60 orang	60 orang	Jumlah Orang yang Mengikut Benangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	15 orang	300 000 00	300 000 00	2 000 000 00		APBD	
2 18 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	1 283 128 566 00	1 403 128 566 00	453 900 000 00			
2 18 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangla Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49 890 000 00	49 890 000 00	5 000 000 00		APBD	

Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan								
							Tolok Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tolok Ukur setelah perubahan					
							Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Setelah perubahan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Setelah perubahan					
2 18 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Didisalkan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Didisalkan	803 047 700,00	803 047 700,00				
2 18 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisalkan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisalkan	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisalkan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisalkan	72 225 000,00	72 225 000,00	35 000 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisalkan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisalkan	45 000 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Didisalkan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Didisalkan	3 000 000,00	3 000 000,00	5 040 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan Material					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Material yang Didisalkan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Material yang Didisalkan	75 000 000,00	75 000 000,00	40 000 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 665 866,00	346 665 866,00	333 860 000,00		APSD	
2 18 01 2 06 0009	Penatausahaan Asep Dinas pada SKPD					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinas pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinas pada SKPD	300 000,00	300 000,00	2 500 000,00		APSD	
2 07 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terselenggaranya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35 000 000,00			
2 07 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Didisalkan		unit			35 000 000,00		APSD	

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan								
							Tolak Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tolak Ukur setelah perubahan				Target Setelah perubahan	
2 18 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	650.852.177,00	620.852.177,00	834.350.000,00			
2 18 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD	
2 18 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	67.552.177,00	67.552.177,00	90.000.000,00		APBD	
2 18 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00		APBD	
2 18 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	576.300.000,00	546.300.000,00	740.350.000,00		APBD	
2 18 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	6.750.000,00	36.750.000,00	77.000.000,00			
2 18 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baye Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	1.750.000,00	1.750.000,00	66.000.000,00		APBD	

Kode	Usulan Bidang Usutan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tokoh Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tokoh Ukur setelah perubahan	Target Setelah perubahan					
2 18 01 2 05 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Tunt			30.000.000,00			APBD	
2 18 01 2 09 00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana/Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	12 unit	12 unit	5.000.000,00		5.000.000,00	11.000.000,00		APBD	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Miliar rupiah		Persentase peningkatan layanan penanaman modal	8,21%	7,59%	229.375.000,00		229.375.000,00	229.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
2 18 02 2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota						Persentase perusahaan yang mendapatkan Fasilitas Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	5 Perusahaan	100%	229.375.000,00		229.375.000,00	30.000.000,00			
2 18 02 2 01 0001	Penetapan Kegiatan Daerah Mengoreksi Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						Jumlah Periklanan Daerah/Proses dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	229.375.000,00		229.375.000,00	30.000.000,00		APBD	

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Indikator Kinerja	
							Tolak Ular sebelum perubahan	Target Usulan	Target Setelah perubahan	Tolak Ular setelah perubahan					
2 18 02 2 02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta potensi Daerah					200 000 000 00			
2 18 02 2 02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen				200 000 000 00		APBD	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	72%	72%	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	72%	494 150 000 00	500 000 000 00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 18 03 2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	1 kali	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	494 150 000 00	500 000 000 00		
2 18 03 2 01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangga Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	493 850 000 00	495 000 000 00	APBD	
2 18 03 2 01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal						Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	300 000 00	5 000 000 00	APBD	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	82	82	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	82	138 945 000 00	220 000 000 00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan									
							Indikator Kinerja									
							Program/Kegiatan/Subkegiatan									
							Tolok Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Sebelum perubahan	Tolok Ukur setelah perubahan	Target Setelah perubahan					
2 18 04 2 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						Jumlah perizinan berusaha bersako yang dikeluarkan	1000 izin	1000 izin	Jumlah perizinan berusaha bersako yang dikeluarkan	1000 izin	138.945.000,00	138.945.000,00	228.000.000,00		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pendataan pemberian fasilitas/izin di daerah kewenangan daerah kabupaten/kota	5 dik	5 dik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pendataan pemberian fasilitas/izin di daerah kewenangan daerah kabupaten/kota	5 dik	7.900.000,00	7.900.000,00	80.000.000,00		APBD
2 18 04 2 01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	67.745.000,00	67.745.000,00	70.000.000,00		APBD
2 18 04 2 01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					Kab. Banggai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pembantuan Pemerintah Kabupaten Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	45 Kegiatan Usaha	45 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pembantuan Pemerintah Kabupaten Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	45 Kegiatan Usaha	63.300.000,00	63.300.000,00	70.000.000,00		APBD
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perencanaan Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	24%	24%	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	24%	420.068.000,00	420.068.000,00	50.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan									
							Tolok Ukur sebelum perubahan	Target Usulan	Target Sebelum perubahan	Tolok Ukur setelah perubahan						
2 18 05 2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 laporan	1 laporan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 laporan	420.069.000,00	420.069.000,00	50.000.000,00		
2 18 05 2 01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	115 Kegiatan Usaha	115 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	115 Kegiatan Usaha	66.440.000,00	66.440.000,00	11.500.000,00		APBD dan DAK
2 18 05 2 01 0005	Benang Tulus kepada Pelaku Usaha						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	225 Pelaku Usaha	225 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	225 Pelaku Usaha	228.288.000,00	228.288.000,00	27.000.000,00		APBD dan DAK
2 18 05 2 01 0006	Pengawasan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	115 Kegiatan Usaha	115 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	115 Kegiatan Usaha	125.341.000,00	125.341.000,00	11.500.000,00		APBD dan DAK
TOTAL											6.602.783.966,00	6.722.783.966,00	6.467.750.000,00			



[illegible]

[illegible]

